

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan mengenai Analisis Prosedur Pemberian Kredit Peduli Usaha Mikro, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat merupakan sebuah lembaga perbankan yang berfungsi menyalurkan dan menghimpun dana dari masyarakat, sesuai Pasal 4 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah yang diikuti Keputusan Direksi Nomor SK/020/DIR/05-2004 tanggal 28 Mei 2004, ditetapkan maksud dan tujuan pendirian Bank Nagari yang merupakan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai berikut, yaitu membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
2. Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) adalah pinjaman yang diberikan kepada perorangan, koperasi, kelompok usaha atau lembaga keuangan mikro dibawah binaan dinas/instansi pemerintah, yang memenuhi kriteria usaha mikro, dan memiliki usaha produktif pada semua sektor ekonomi yang tidak melanggar atau

bertentangan dengan KPB dan PPK Bank serta peraturan perundangan yang berlaku.

3. Tujuan penggunaan Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) adalah untuk investasi dan modal kerja dengan maksimal Plafond Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan Jangka waktu maksimal 6 (enam) tahun atau 72 (tujuh puluh dua) bulan untuk KPUM-Investasi dan maksimal 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan untuk KPUM-Modal Kerja.

4. Prosedur Pemberian Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM)

- a. Pengajuan permohonan
- b. Pengisian Formulir/Aplikasi permohonan yang di sediakan oleh Bank Nagari Cabang Painan
- c. Pemeriksaan kelengkapan permohonan
- d. Permohonan kredit didisposisikan (diagendakan)
- e. Ideb (Informasi Debitur)
- f. Analisa debitur/survey lapangan
- g. Pemeringkat Kredit (Rating)
- h. Rekomendasi
- i. Keputusan Kredit
- j. Pemberitahuan Keputusan Kredit
- k. Perjanjian Kredit dan turutannya
- l. Realisasi Kredit (Pencairan Kredit)

5. Kolektabilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan dan Macet termasuk ke dalam kredit bermasalah yang biasa disebut dengan istilah *Non Performing Loan*

(NPL). Yang tergolong kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami kesulitan melakukan angsuran atau pelunasan sesuai dengan ketentuan atau perjanjian kredit yang dilakukan pada awal permohonan kredit. total penyaluran Kredit Peduli Usaha Mikro tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar Rp. 5.452.000.000,-, yang disebabkan oleh daya beli masyarakat yang cenderung flat, sehingga debitur mengurangi atau tidak menambah volume produksinya dan mengakibatkan rendahnya permintaan atas Kredit Peduli Usaha Mikro. Dan daya beli masyarakat yang cenderung flat dan menurun juga menyebabkan Peningkatan kredit bermasalah yang mengakibatkan pendapatan debitur menurun dan menyebabkan debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Kredit bermasalah KPUM pada tahun 2016 sebesar Rp. 973.000.000,- dan kredit tidak bermasalah sebesar Rp. 4.479.000.000,-. Sedangkan total penyaluran Kredit Peduli Usaha Mikro tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar Rp. 8.736.000.000,-, yang disebabkan oleh penurunan tingkat suku bunga KPUM dari 12% pada tahun 2016 menjadi 10,5% ditahun 2017, dan mengakibatkan tingginya permintaan atas Kredit Peduli Usaha Mikro, sehingga debitur menambah volume produksinya dan meningkatkan pendapatan debitur menyebabkan Penurunan kredit bermasalah dan menyebabkan debitur mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Kredit bermasalah KPUM pada tahun 2017 sebesar Rp. 648.000.000,- dan kredit tidak bermasalah sebesar Rp. 8.088.000.000,-.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan mengenai Analisis Prosedur Pemberian Kredit Peduli Usaha Mikro, penulis mengemukakan beberapa saran, diantaranya :

1. Dalam melakukan proses kredit, unit kerja harus lebih berhati – hati dalam mengecek kebenaran berkas maupun keaslian dokumen yang dipersyaratkan, dan juga dalam menganalisis data – data yang diperoleh dari debitur, agar tidak terjadi kredit macet.
2. Sebaiknya sistem jaringan bank diperbaiki agar tidak mengganggu dalam proses memperoleh informasi yang berasal dari Sistem Informasi Debitur, sehingga proses kredit dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.



